



Peran Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong Dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Sorong

Nurdin Ibnu Fikri Hatapayo¹

¹ Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juli 2, 2025
Revised Juli 14, 2025
Accepted Juli 17, 2025

Kata Kunci:

Peran,
Kesbangpol,
Stabilitas kerukunan,

Keywords:

Role,
Kesbangpol,
Stability of harmony

ABSTRAK

Penelitian ini di bertujuan untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong dan upaya menjaga stabilitas kerukunan umat beragama di Kabupaten Sorong. Metode yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori peran Biddle dan Thomas sebagai landasan teoritik utama. Informan penelitian ini meliputi 6 orang, 1 Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong, Tokoh Agama yang tergabung dalam Forum Keukunan Umat Beragama (FKUB) dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara, dan Studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong memiliki peran yang kuat dalam menjaga stabilitas kerukunan umat beragama dengan Melakukan deteksi dini konflik dan membangun komunikasi yang baik dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Serta mensosialisasikan pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Meski demikian Badan Kesbangpol masih di hadapkan dengan tantangan seperti keterbatasan anggaran dan provokasi yang sering di lakukan oleh pihak luar. Dengan menjaga komunikasi yang baik antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Tokoh agama serta masyarakat membawa dampak yang positif bagi stabilitas daerah dan kerukunan umat beragama.

ABSTRACT

This research aims to find out the role of the Sorong Regency National and Political Unity Agency (Kesbangpol) and efforts to maintain the stability of religious harmony in Sorong Regency. The method used is a descriptive qualitative approach with the theory of the role of Biddle and Thomas as the main theoretical foundation. The informants of this study include 6 people, 1 Head of the Sorong Regency Kesbangpol Agency, Religious Leaders who are members of the Forum for Religious Unity (FKUB) and the Community. Data collection techniques use interviews, and documentation studies. Meanwhile, the data analysis technique uses Miles and Huberman theory. The results of the study show that the Sorong Regency National and Political Unity Agency (Kesbangpol) has a strong role in maintaining the stability of religious harmony by conducting early detection of conflicts and building good communication with the Religious Harmony Forum (FKUB). As well as socializing the importance of tolerance in community life. However, the Kesbangpol Agency is still faced with challenges such as budget limitations and provocations that are often carried out by outsiders. By maintaining good communication between the National and Political Unity Agency and religious leaders and the community, it has a positive impact on regional stability and religious harmony.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Nurdin Ibnu Fikri Hatapayo
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong,
Sorong, Indonesia
Email: fikrihatapayo21@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat beragam dalam aspek agama, sosial, dan budaya. Sesuai dengan semboyan nasional “Bhinneka Tunggal Ika”, keberagaman tersebut tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu. Dengan keberadaan berbagai agama, Indonesia diharapkan dapat terus memelihara keharmonisan antarumat beragama. Saat ini, pemerintah mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Namun demikian, keberagaman dalam struktur masyarakat juga menyimpan potensi munculnya konflik sosial. Gesekan-gesekan yang terjadi dapat mengganggu stabilitas kerukunan antaragama. Perbedaan ajaran agama dan budaya, serta adanya kelompok mayoritas dan minoritas pemeluk agama, bisa menjadi pemicu terjadinya benturan sosial.

[1]

Keberagaman dalam etnis, suku, budaya, ras, dan agama tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat, tetapi juga dapat memunculkan berbagai sentimen, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, konflik yang berakar pada perbedaan agama pernah terjadi di sejumlah wilayah, seperti Kalimantan Barat, Poso, Ambon, dan Maluku Utara. Pertentangan keagamaan ini umumnya dipicu oleh perbedaan keyakinan, penafsiran ajaran, atau tuntutan kepercayaan antar kelompok maupun individu. Selain itu, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik kerap memperparah kondisi yang ada. Akibatnya, stabilitas kerukunan dan hubungan antarumat beragama di Indonesia menjadi terganggu..

Meneliti dan mempelajari isu mengenai kerukunan antarumat beragama merupakan topik yang menarik dan penting. Kerukunan antarumat beragama merupakan salah satu aspek krusial dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya menjaga harmoni antar pemeluk agama didasarkan pada pemahaman bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab yang setara dalam menjaga kepentingan bersama, tanpa memandang latar belakang agama. Sering kali, sekelompok orang menilai bahwa hanya pandangan atau tindakan mereka yang benar, sementara kelompok lain dianggap keliru. Sikap seperti ini dapat memicu konflik antaragama yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan yang telah dibangun. Di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa sebagian kelompok agama merasa memiliki dominasi atas wilayah tertentu, yang menyebabkan kelompok lain merasa tersisihkan atau tidak diperlakukan secara adil dalam kehidupan sosial.

Selain berbagai permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama juga dapat menjadi pemicu ketegangan antarumat beragama. Hal ini disebabkan oleh munculnya sikap fanatisme yang tidak dibarengi dengan pengetahuan agama yang memadai. Berbagai faktor serta pemicu yang ada sering kali berkontribusi pada timbulnya konflik antar pemeluk agama, yang dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas dan kompleks. [2]. Dari sudut pandang sosiologi, seseorang tidak hanya membutuhkan orang lain, tetapi juga lingkungan alam. Dengan cara ini, diperlukan interaksi. Dalam berbagai interaksi, konflik mau tidak mau muncul karena perbedaan kecenderungan, kebutuhan, nilai, budaya, agama, politik, masyarakat, ekonomi, dan lain-lain. Hubungan yang harmonis harus didasari oleh rasa saling Saling

pengertian dan rasa hormat berakar pada kesadaran akan hak dan kewajiban setiap individu dalam menjalankan keyakinannya. Kabupaten Sorong di Papua Barat Daya, terlepas dari keberagaman agama dan budayanya, dikenal karena toleransi dan kerukunan antarumat beragama yang kuat.

Pada tahun 2023, Kementerian Agama RI melaporkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) sebesar 78,64 untuk wilayah tersebut. Kerukunan ini dinilai melalui tiga indikator utama: toleransi, kesetaraan, dan kolaborasi. Toleransi mengacu pada sikap menerima dan menghormati kelompok agama yang berbeda. Kesetaraan melibatkan komitmen untuk menegakkan dan menjaga hak dan kesempatan yang sama bagi semua komunitas. Sementara itu, kolaborasi mencerminkan kesediaan untuk terlibat secara sosial dan menunjukkan empati di berbagai aspek kehidupan—baik agama, ekonomi, budaya, maupun sosial. Indikator-indikator ini secara kolektif membantu mengukur sejauh mana kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat. [3].

Meskipun saat ini Kota dan Kabupaten Sorong tengah ramai diberitakan di media akibat meningkatnya angka kriminalitas—tercatat sebanyak 364 kasus sepanjang tahun 2023 di wilayah hukum Polres Kabupaten Sorong—fenomena kriminalitas ini jelas merugikan, baik bagi korban langsung maupun masyarakat secara umum. Tindakan kriminal merusak suasana aman dan tertib, serta berpotensi menjadi pemicu konflik sosial. Selain itu, penyebaran informasi mengenai tindakan intoleransi di berbagai daerah melalui media sosial juga dapat memicu perpecahan antarumat beragama. Salah satu kasus yang baru-baru ini mencuat adalah gangguan terhadap kegiatan ibadah yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa di Tangerang, bahkan hingga mengarah pada tindakan kekerasan terhadap mereka yang sedang menjalankan ibadah. Tentu saja, tindakan semacam ini perlu dicegah di masa mendatang karena berpotensi mengganggu stabilitas kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Di wilayah Sorong sendiri, pernah terjadi kasus penistaan agama yang menghebohkan publik. Peristiwa ini bermula dari beredarnya sebuah video di media sosial Facebook pada tanggal 8 Desember 2019, yang memperlihatkan dua remaja melakukan gerakan salat sambil berjoget di atas sajadah merah dengan iringan musik dugem. Tindakan tersebut jelas mencederai nilai-nilai kesucian agama dan dapat memicu ketegangan antarumat beragama. Kasus lain yang juga mencuat adalah pernyataan dari seorang advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kaki Abu terkait pemindahan enam tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sorong ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk proses persidangan. Pernyataan itu disampaikan dalam orasi di depan Kantor Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 4 Januari 2022. Dalam orasinya, terdapat pernyataan yang dianggap menyinggung dan menistakan agama. Pernyataan tersebut mengutip ucapan seniorinya, “Mendiamkan kejahatan sama dengan melakukan kejahatan,” lalu dilanjutkan dengan kalimat yang bernada provokatif, menyebut tempat ibadah dan menyindir mereka yang memilih diam sebagai seolah-olah mengikuti perintah Tuhan untuk membiarkan kejahatan. Ucapan seperti itu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Akibatnya, sejumlah warga merasa tersinggung dan turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa, bahkan sampai memblokade Jalan Jenderal Sudirman di Kota Sorong, Papua Barat. Kejadian semacam ini tentu sangat disayangkan, karena berpotensi merusak kerukunan antarumat beragama yang telah terbangun dengan baik selama ini hanya karena ucapan atau tindakan yang tidak bijak.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu data data yang di kumpulkan berbentuk kata kata, Gambar bukan dengan angka angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang di kutip Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata atau lisan dari orang orang dan perilaku yang di amati. Sementara itu penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang di tuju untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia [4].

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

2.2 Sumber Data

Menurut *Lofland* dan *Lofland* sebagaimana yang telah dikutip oleh *Lexy. J. Moleong* dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan sumber data tambahan termasuk dokumen dan hal-hal lainnya [5]. Dalam konteks ini, data dibagi menjadi dua bagian, Sumber data dalam suatu penelitian mencakup kata-kata, tindakan, serta dokumen tertulis yang relevan. Secara umum, sumber data merujuk pada pihak atau objek yang menjadi asal pengumpulan informasi. Apabila data dikumpulkan melalui wawancara, maka individu yang memberikan tanggapan—baik secara lisan maupun tertulis—disebut sebagai informan. Jika data diperoleh melalui observasi, maka objek, aktivitas, atau kejadian yang diamati menjadi sumber informasi. Sementara itu, apabila dokumentasi yang digunakan sebagai metode, maka bahan referensi seperti dokumen atau arsip yang memiliki keterkaitan menjadi sumber data utamanya.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto, teknik pengumpulan data merupakan berbagai cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Teknik ini merujuk pada konsep yang bersifat abstrak, yang meskipun tidak tampak secara fisik, penggunaannya dapat diperlihatkan secara nyata [6]. Dalam proses pengumpulan data, peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati objek penelitian guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa metode yang dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1 Metode Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan proses mencatat dan mengamati secara sistematis terhadap fenomena yang terlihat pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan metode observasi partisipatif, di mana peneliti turut serta dalam aktivitas sehari-hari subjek yang diteliti atau dijadikan sumber data. Melalui observasi langsung, peneliti tidak hanya bertindak sebagai pengamat yang menyaksikan dan mencatat gejala atau proses yang terjadi dalam situasi nyata, tetapi juga berperan sebagai partisipan yang ikut terlibat dalam aktivitas tersebut.

2.3.2 Metode Wawancara

Menurut Moleong, wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang memiliki tujuan tertentu dan melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban [7]. Teknik ini termasuk salah satu metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif. Proses wawancara dilakukan secara verbal dalam bentuk percakapan langsung antara dua individu. Wawancara yang ditujukan untuk menggali informasi dari seseorang biasanya dilaksanakan secara tatap muka atau individu..

2.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu dengan menggambarkan data yang diperoleh dalam bentuk narasi, gambar, dan bukan data numerik. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan lainnya akan diuraikan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai realitas yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dimulai sejak sebelum peneliti memasuki lokasi penelitian, berlangsung selama pengumpulan data di lapangan, dan berlanjut setelah kegiatan

lapangan selesai. Pada praktiknya, proses analisis data kualitatif dilakukan secara berkesinambungan selama pengumpulan data berlangsung. Menurut Miles dan Huberman (dalam Erland Mouw, 2020:70), terdapat tiga tahapan utama dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan studi ini menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong memegang peran penting dalam mendorong kerukunan antarumat beragama melalui strategi yang bersifat dialogis, kolaboratif, dan preventif. Badan ini secara konsisten terlibat dalam komunikasi terbuka dengan para pemimpin agama dengan memanfaatkan platform seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan bermitra dengan berbagai organisasi berbasis masyarakat. Inisiatif-inisiatif ini dirancang untuk mendorong dialog antaragama yang konstruktif dan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi sumber konflik pada tahap awal. Wawasan yang dikumpulkan dari wawancara komprehensif dengan informan kunci, termasuk Kepala Kesbangpol dan para pemimpin agama setempat, menyoroti kontribusi penting badan ini dalam menumbuhkan rasa saling percaya dan membangun lingkungan komunikatif yang mendukung koeksistensi damai dalam masyarakat multikultural Sorong.

Selain fungsi utamanya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) secara aktif melaksanakan berbagai inisiatif yang mempromosikan toleransi dan memperkuat jati diri bangsa. Program-program ini terutama menyasar mahasiswa, kelompok pemuda, dan komunitas lintas agama, yang bertujuan untuk menumbuhkan pola pikir toleransi dan membendung penyebaran ideologi radikal di Kabupaten Sorong. Inisiatif-inisiatif ini disusun untuk meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam. Dalam melaksanakan upaya ini, Kesbangpol bermitra dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat untuk memastikan nilai-nilai moderasi beragama dikomunikasikan dan dianut secara luas oleh masyarakat luas. Menurut masukan dari para tokoh agama yang diwawancarai selama penelitian, program-program ini relatif berhasil dalam menumbuhkan rasa saling menghormati dan mengurangi dampak provokasi yang memecah belah. Terlepas dari hasil positif ini, Kesbangpol masih bergulat dengan tantangan seperti keterbatasan anggaran dan pengaruh eksternal yang mengganggu yang mempersulit penyelesaian konflik. Meskipun demikian, Kesbangpol tetap berkomitmen teguh untuk memajukan kerukunan antarumat beragama, yang memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di Kabupaten Sorong.

3.1 Pembahasan

3.1.1 Peran Badan Kesbangpol Dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan Umat Beragama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjalankan peran penting dalam memelihara keharmonisan antarumat beragama di wilayah Sorong. Upaya menjaga kerukunan antaragama merupakan elemen krusial dalam proses pembangunan sosial dan nasional di Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan keragaman agama, etnis, dan budaya. Dalam konteks ini, keberadaan Kesbangpol menjadi sangat vital. Sebagai institusi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam bidang stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, Kesbangpol tidak hanya bertindak sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan sosial di tengah masyarakat yang plural.

Kesbangpol berperan sebagai ujung tombak dalam upaya pencegahan terhadap potensi konflik, khususnya dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Tugasnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup fungsi strategis dalam mengantisipasi gesekan sosial serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong, Bapak Adri Timban, turut menjelaskan

mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta bidang-bidang yang secara khusus menangani isu kerukunan antarumat beragama di daerah tersebut. *“memang tugas kami dari sisi kesbangpol karna kita membina stabilitas daerah, kalau kita lihat kan stabilitas ini terganggu karena gesekan gesekan antar umat beragama, Itu masuk di bidang ekonomi sosial budaya dan ormas di ekonomi sosial budaya itu sudah termasuk ke kerukunan umat beragama jadi memang tupoksi kita itu”.* (04/03/2025)

Tokoh-tokoh agama bersama dengan Badan Kesbangpol menjalin kerja sama erat dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama serta menciptakan stabilitas sosial dan politik di tengah masyarakat. Kerja sama ini menjadi sangat relevan, khususnya di wilayah Indonesia yang pluralistik, seperti di Sorong yang memiliki keberagaman keyakinan. Dalam wawancara dengan peneliti, salah satu tokoh agama Hindu memberikan penjelasan terkait kontribusi dan pandangannya terhadap upaya menjaga kerukunan tersebut.

“Peran Kesbangpol Kabupaten Sorong bersama kami di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah terjalin secara harmonis dan penuh sinergi. Selama ini, Kesbangpol menjadi mitra kerja yang solid dalam berbagai upaya untuk menciptakan dan menjaga kerukunan antarumat beragama di wilayah Kabupaten Sorong”. (05/03/2025)

Kolaborasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah terbukti kuat dan efektif. Hubungan kerja sama ini menunjukkan sinergi tingkat tinggi dalam upaya menegakkan dan meningkatkan kerukunan antarumat beragama di wilayah tersebut. Melalui koordinasi yang erat, kedua entitas bekerja sama untuk membina lingkungan yang aman dan inklusif yang menghormati keragaman agama, budaya, dan sosial yang ada di Kabupaten Sorong. Komitmen bersama mereka untuk mempromosikan toleransi dan hidup berdampingan secara damai menjadi fondasi penting untuk menumbuhkan masyarakat yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan persatuan. Hal ini selanjutnya didukung oleh wawasan yang dibagikan selama wawancara dengan Bapak I Gede Idayana, seorang pemimpin agama Hindu terkemuka, dan Bapak Ahad Saka, seorang perwakilan Islam di FKUB yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sorong. *Salah satu tokoh agama dari Muslim menyampaikan bahwa selama ini hubungan dan kerja sama antara Kesbangpol dan para pemuka agama terjalin dengan sangat baik. Hal tersebut terbukti nyata di masyarakat dalam bentuk kerukunan antarumat beragama yang terjaga. Ia menegaskan bahwa komunitas Muslim memandang umat agama lain sebagai saudara, tanpa memandang latar belakang suku maupun agama. Semua pihak bersama-sama berperan dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman di Kabupaten Sorong. Ia juga mengakui bahwa kondisi tersebut tidak terlepas dari bimbingan dan arahan yang diberikan oleh Kesbangpol.* (5 Maret 2025)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Matelda, salah satu tokoh agama Katolik sekaligus pengurus gereja, saat diwawancarai oleh peneliti. Ia menilai bahwa peran Kesbangpol Kabupaten Sorong sangat penting dan konsisten dalam upaya menjaga keharmonisan antarumat beragama di daerah tersebut. Menurutnya, *“hubungan komunikasi antara umat Katolik dan pihak Kesbangpol terjalin dengan sangat baik dan penuh kedekatan, serta selalu berlangsung secara terbuka dan harmonis.”.* (05/03/2025)

Para tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menyampaikan bahwa hubungan komunikasi antara pihak pemerintah, dalam hal ini Badan Kesbangpol, dengan para tokoh agama terjalin dengan baik, sehingga berbagai program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama. Mengacu pada pandangan Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015:224), peran dapat diartikan sebagai serangkaian ekspektasi yang mengarahkan perilaku individu dalam suatu posisi atau jabatan tertentu. Dalam konteks ini, Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong memiliki posisi strategis dan diharapkan mampu menjalankan peran tersebut secara optimal. Untuk mengetahui sejauh mana peran dijalankan oleh seseorang atau lembaga dalam suatu kedudukan, hal ini dapat ditelaah melalui tindakan konkret yang diambil selama menempati posisi tersebut.

3.2 Langkah Strategis Badan Kesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong memiliki peran yang vital dan strategis dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama di tengah masyarakat yang heterogen. Tugas ini dilaksanakan melalui berbagai program yang bersifat edukatif dan pencegahan, yang bertujuan untuk menanamkan pentingnya nilai-nilai toleransi, mendorong terjadinya dialog antar agama, serta mengantisipasi munculnya konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Kesbangpol tidak hanya berperan sebagai fasilitator komunikasi antara tokoh agama dan masyarakat, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan keagamaan dengan kebijakan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, lembaga ini bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), guna menciptakan kehidupan beragama yang damai dan seimbang, serta memperkokoh semangat kebangsaan.

Di Kabupaten Sorong, kolaborasi antara para tokoh agama dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjadi pendekatan vital dalam membina kerukunan antarumat beragama dan stabilitas sosial. Didukung penuh oleh Kesbangpol, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berfungsi sebagai wadah bagi perwakilan berbagai agama—seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha—untuk terlibat secara rutin dalam dialog antaragama, seminar nasional, dan diskusi yang berfokus pada toleransi dan moderasi beragama. Selain itu, Kesbangpol melakukan kunjungan ke berbagai tempat ibadah sebagai bentuk solidaritas dan mempererat ikatan antarumat beragama. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya meningkatkan komunikasi timbal balik antar tokoh agama, tetapi juga bertindak sebagai langkah preventif untuk mendeteksi dan mengatasi potensi sumber ketegangan sosial sejak dini. Kemitraan ini telah menunjukkan keberhasilan dalam menumbuhkan lingkungan yang damai, saling menghormati, dan koeksistensi beragama di masyarakat Sorong yang beragam. Pentingnya kolaborasi ini juga ditegaskan dalam wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpol.

“Di Kabupaten Sorong, tercermin semangat kebersamaan antarumat beragama melalui berbagai kegiatan lintas agama yang rutin dilakukan. Salah satu contoh konkret adalah adanya partisipasi lintas tokoh agama dalam kegiatan seperti Safari Ramadan dan Safari Natal. Dalam kegiatan tersebut, para pendeta ikut hadir di masjid dan para ustaz hadir di gereja sebagai bentuk solidaritas dan kebersamaan di luar konteks ritual ibadah masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dan menjangkau hingga ke wilayah distrik. Selain itu, dalam perayaan keagamaan seperti perayaan umat Katolik di gereja Pasar Sore, seluruh unsur tokoh agama ikut serta. Hal serupa juga dilakukan untuk umat Hindu dan Buddha, meskipun komunitas mereka tergolong kecil di Sorong. Sebagai contoh, dalam sebuah kegiatan keagamaan umat Buddha yang diikuti oleh sekitar 40 orang, pengamanan dan dukungan dilakukan oleh ratusan masyarakat lintas agama. Para tokoh agama dari berbagai keyakinan turut hadir, tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga sebagai wujud nyata dalam memperkuat harmoni dan toleransi antarumat beragama. Keterlibatan aktif ini merupakan salah satu strategi yang efektif dalam menjaga komunikasi lintas agama dan membina suasana keberagaman yang aman dan damai di Kabupaten Sorong”. (24/03/2025



Gambar 1. Rakor Kesbangpol

Sumber : Kesbangpol Kab. Sorong (8/10/2024).

Pada tanggal 8 Oktober 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari berbagai organisasi di wilayah tersebut. Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Kesbangpol ini difokuskan pada pembahasan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas dan keamanan daerah, terutama menjelang dimulainya tahapan kampanye terbuka dalam proses pemilu. Dalam forum tersebut, para tokoh agama didorong untuk memberikan imbauan kepada para jamaah dan komunitasnya masing-masing agar turut berperan aktif dalam menciptakan suasana yang damai dan kondusif di tengah masyarakat Kabupaten Sorong.

Dalam sesi wawancara dengan Bapak Erwin Gotama, salah satu tokoh agama Buddha sekaligus pengurus Wihara di wilayah Kampung Kerukunan, disampaikan bahwa *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran yang sangat positif dan responsif dalam mendukung kehidupan beragama masyarakat setempat. Menurutnya, perhatian Kesbangpol terhadap warga di Kampung Kerukunan cukup besar, ditunjukkan melalui dukungan aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan lintas agama. Dukungan tersebut mencakup perayaan hari besar keagamaan seperti Paskah, Idulfitri, serta kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan Wihara. Selain Kesbangpol, dukungan juga datang dari para tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang bersama-sama menjaga keharmonisan dan saling menghargai antarumat beragama di wilayah tersebut. (27/02/2025)*

Melalui inisiatif yang mempromosikan keberagaman dan menangkal radikalisme di sekolah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjalankan sejumlah program di sekolah untuk memelihara perdamaian beragama sejak usia dini. Program-program ini menanamkan toleransi dan rasa hormat terhadap keberagaman. Pengetahuan dibagikan ke seluruh negeri. Hal-hal seperti inilah yang sering dilakukan. Selain itu, Kesbangpol bekerja sama dengan para pendidik dan lembaga pendidikan untuk menangkal ekstremisme agama dan memajukan toleransi beragama. Kesbangpol bercita-cita untuk menumbuhkan generasi penerus yang toleran, patriotik, dan damai melalui keterlibatan generasi muda di sekolah, sebagaimana diungkapkan dalam percakapan penulis dengan Bapak Adri Timban, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong..

Kegiatan pembinaan secara rutin dilakukan oleh pihak Kesbangpol, khususnya di lingkungan sekolah, sebagai bagian dari upaya preventif terhadap penyebaran paham radikalisme. Setiap kali pelajar memasuki masa orientasi, pihak Kesbangpol bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) turut serta memberikan edukasi mengenai bahaya radikalisme serta pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama. Program ini telah dilaksanakan di berbagai wilayah seperti

Katapop, Jalan Tren, dan Klamono. Sementara itu, wilayah Makbon masih belum dijangkau oleh kegiatan ini, mengingat wilayah tersebut belum banyak dihuni oleh pendatang. Berbeda halnya dengan daerah seperti Klamono yang memiliki komposisi masyarakat yang lebih seimbang, di mana terdapat masjid dan gereja yang mencerminkan keberagaman agama.”. (04/03/2025).

Dari dokumentasi lainnya juga memperlihatkan bahwa kegiatan ini berjalan di sekolah sekolah salah satunya di SMKN 1 Kab. Sorong pada 2023.



Gambar 2. Sosialisasi Kerukunan Kesbangpol dan FKUB di SMKN 1 Kab. Sorong
Sumber: Arsip Kesbangpol Kabupaten Sorong



Gambar 3. Sosialisasi Toleransi Umat Beragama di SMK Modellink SMK Modellink SP 3

Program tersebut merupakan hasil kerja sama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sorong dengan pihak sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai hidup dalam keberagaman kepada siswa sejak usia dini, serta mencegah masuknya paham radikal di lingkungan pendidikan. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan tercipta suasana belajar yang damai dan aman dalam masyarakat multikultural di Kabupaten Sorong. Program ini juga ditujukan untuk membentuk karakter generasi muda yang menjunjung tinggi toleransi, memiliki semangat kebangsaan, dan mencintai kedamaian dalam kehidupan sosial mereka.

3.3 Forum Kerukunan Umat Beragama

FKUB adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Di Kabupaten Sorong, FKUB berfungsi sebagai wadah bagi tokoh agama dan masyarakat untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan kerukunan antar umat beragama. FKUB berperan dalam menciptakan pemahaman, toleransi, dan mencegah konflik antar umat beragama.

a. Program dan Kegiatan rutin

Sebagai forum yang memiliki mandat menjaga dan merawat kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Sorong, FKUB secara konsisten menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan rutin yang bersifat promotif dan preventif. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang tidak hanya untuk mempererat hubungan antarumat beragama, tetapi juga untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Beberapa program unggulan yang telah menjadi agenda tetap FKUB Kabupaten Sorong antara lain safari lintas ibadah, pembinaan kampung sadar kerukunan, serta dialog tokoh agama dan tokoh adat. Melalui kegiatan-kegiatan ini, FKUB hadir sebagai jembatan komunikasi antaragama dan sekaligus sebagai garda terdepan dalam menangkal potensi konflik sosial berbasis agama di tingkat lokal

1) Safari Lintas Agama

Safari Lintas Agama yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sorong menjadi salah satu program strategis dalam membangun dan memperkuat hubungan harmonis antarumat beragama di wilayah tersebut. Kegiatan ini tidak hanya berupa kunjungan silaturahmi ke rumah-rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura, dan vihara, penyampaian pesan-pesan damai yang menekankan pentingnya toleransi, saling menghargai, serta hidup berdampingan secara rukun. FKUB Kabupaten Sorong secara aktif hadir dalam berbagai momentum keagamaan, termasuk menghadiri perayaan hari besar agama seperti Idul Fitri, Natal, Waisak, Nyepi, maupun perayaan besar lainnya. Kehadiran ini bukan hanya simbolis, tetapi menjadi bentuk dukungan moral dan komitmen nyata dalam menjaga semangat persaudaraan lintas iman.



Gambar 4. Safari Sholat Idul Fitri



Gambar 5. Kunjungan Ke Pura

2) Kampung Kerukunan

Kampung Kerukunan merupakan sebutan sebuah daerah di Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Di kampung ini memiliki keunikan yang jarang ditemukan di daerah perkampungan lainnya di tanah Papua. Keunikannya adalah terdapat rumah ibadah untuk umat nasrani, islam, hindu dan budha.

Jumlah penduduk kampung kerukunan yang datang dari suku dan ras berbeda ini berkisar 500 kepala keluarga, mereka terus menjaga kekompakan agar dapat menjadi contoh bagi warga lain di kabupaten hingga Kota Sorong. Kampung Kerukunan di Kabupaten Sorong dihuni oleh sekitar 1.200 hingga 1.500 jiwa yang berasal dari beragam latar belakang suku dan agama. Warga di wilayah ini terdiri dari pemeluk Islam, Kristen, serta agama-agama lainnya yang hidup berdampingan secara rukun dan damai. Kehidupan sosial di kampung ini ditandai dengan tingginya semangat kebersamaan, yang tercermin dalam berbagai kegiatan bersama, seperti peringatan hari-hari besar keagamaan dan kegiatan sosial yang turut mempererat hubungan antarumat beragama.

3) Pertemuan rutin FKUB dan Kesbangpol

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sorong dan Badan Kesbangpol secara konsisten melaksanakan pertemuan rutin setiap bulan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga dan memperkuat kerukunan antarumat beragama di wilayah Kabupaten Sorong. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda strategis yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga sebagai ruang yang produktif untuk berdialog, bertukar informasi, serta merumuskan solusi bersama terhadap berbagai isu sosial keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam setiap pertemuan, FKUB dan Kesbangpol membahas perkembangan dinamika kerukunan, mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dijalankan, serta menyusun rencana tindak lanjut yang lebih responsif dan kontekstual dengan kondisi masyarakat.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh para tokoh agama dari berbagai latar belakang seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, yang aktif menyampaikan pandangan serta pengalaman mereka dalam membina umat masing-masing. Dengan adanya forum ini, pemerintah daerah melalui Kesbangpol dapat menerima masukan langsung dari akar rumput, sehingga kebijakan yang disusun lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi sarana penguatan jejaring antarumat beragama yang selama ini sudah terjalin dengan baik di Kabupaten Sorong.

Melalui koordinasi yang terjadwal secara berkala ini, FKUB dan Kesbangpol dapat memastikan bahwa setiap potensi konflik dapat dideteksi lebih awal dan ditangani secara bijaksana melalui pendekatan dialog. Kolaborasi ini tidak hanya mencerminkan kematangan demokrasi lokal dalam mengelola keberagaman, tetapi juga menunjukkan bahwa kerukunan tidak bisa dibiarkan berjalan secara alami tanpa usaha bersama. Dengan demikian, pertemuan bulanan FKUB dan Kesbangpol menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat toleransi, serta membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan damai di Kabupaten Sorong.



Gambar 6. Pertemuan Rutin FKUB & Kesbangpol



Gambar 7. Pertemuan FKUB & Kesbangpol

3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Kesbangpol dalam Menjaga Stabilitas Kerukunan

3.3.1 Faktor Pendukung

Untuk menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Sorong, sejumlah komponen kunci berperan penting dalam meningkatkan efektivitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Komponen-komponen ini menjadi landasan yang kokoh untuk memperkuat strategi pencegahan potensi konflik antarumat beragama dan untuk memupuk kolaborasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat luas. Memahami faktor-faktor pendukung ini sangat penting dalam mengevaluasi seberapa baik Kesbangpol menjalankan misinya dalam mewujudkan masyarakat yang stabil dan harmonis. Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan elemen-elemen penting yang mendukung implementasi strategis peran Kesbangpol dalam menjaga kohesi antarumat beragama di wilayah ini.

Kesadaran Masyarakat

Kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya toleransi merupakan fondasi kunci untuk menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Sorong. Nilai-nilai seperti saling menghormati, menerima perbedaan keyakinan, dan hidup berdampingan secara damai telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Keterbukaan terhadap perbedaan agama tercermin dalam hubungan sosial yang harmonis antarumat beragama. Kesadaran ini terbentuk melalui proses hidup bersama dan kontribusi aktif para pemuka agama. Dengan adanya kesadaran bersama ini, kemungkinan terjadinya gesekan antar kelompok agama dapat diminimalisir, karena masyarakat lebih memilih pendekatan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Pola sikap ini menjadi elemen penting yang memperkuat peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menjaga keseimbangan dan kedamaian antarumat beragama di wilayah Sorong. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Kepala Bagian Kesbangpol Kabupaten Sorong, Bapak Adri Timban, S.H., beliau mengungkapkan bahwa: *“Jika membahas mengenai stabilitas kerukunan, khususnya pada saat-saat krusial seperti pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), sesungguhnya potensi konflik cukup tinggi. Namun, di wilayah Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong menjadi satu-satunya daerah yang tidak mengalami sengketa hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini bukan semata-mata hasil kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi merupakan buah dari terjalannya komunikasi yang baik antara seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, patut disyukuri bahwa proses demokrasi di daerah ini berjalan lancar. Keberhasilan ini tidak terlepas dari tingginya kesadaran masyarakat serta kontribusi aktif para tokoh agama dalam menjaga suasana tetap kondusif”*. (04/03/25)

Menurut Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong, kemampuan daerah untuk menjaga kerukunan antarumat beragama—terutama di masa-masa sensitif politik seperti pemilihan legislatif dan daerah—sangat bergantung pada keterlibatan proaktif seluruh lapisan masyarakat. Tanggung jawab

untuk menjaga perdamaian dan persatuan tidak hanya berada di tangan lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga sangat bergantung pada kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan bangsa. Selain itu, peran para tokoh agama dalam membimbing masyarakat untuk menjunjung tinggi toleransi dan menghormati perbedaan pandangan politik berperan penting dalam mencegah potensi ketegangan sosial..

3.3.2 Sinergi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Di Kabupaten Sorong, menjaga keharmonisan kehidupan antarumat beragama sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB adalah tempat komunikasi lintas agama dan berfungsi untuk memperkuat hubungan antara tokoh agama dan pemerintah daerah. Dengan bekerja sama, potensi konflik keagamaan dapat dideteksi sejak dini, dan masalah dapat diselesaikan melalui diskusi dan musyawarah. Selain itu, FKUB juga berperan aktif dalam menyosialisasikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan kepada masyarakat, serta mendorong terciptanya ruang interaksi sosial yang inklusif dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, sinergi antara Kesbangpol dan FKUB menjadi fondasi penting dalam membangun tatanan sosial yang rukun di tengah keberagaman masyarakat.

1. Peran aktif Tokoh Agama

Tokoh agama memegang peranan yang sangat signifikan dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sorong. Para pemimpin agama, melalui pengaruh moral dan posisi terhormat mereka di masyarakat, memainkan peran penting dalam memupuk dialog dan mendorong umatnya untuk menjunjung tinggi toleransi dan rasa hormat lintas agama. Partisipasi mereka dalam inisiatif komunitas dan diskusi antaragama sangat penting dalam meredakan konflik dan memelihara persatuan. Selain tanggung jawab spiritual, mereka juga berperan sebagai pembawa damai, bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis bagi kehidupan beragama.

3.3.3 Faktor Penghambat

1) Provokasi

Dalam upaya menangani permasalahan yang memengaruhi kerukunan umat beragama, Badan Kesbangpol (Badan Kesbangpol) kerap menemui kesulitan dalam menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh oknum-oknum yang bertindak tidak bertanggung jawab. Ketika pemerintah berupaya memediasi perselisihan dan perbedaan pendapat, muncul suara-suara yang bertujuan untuk menghasut publik, sehingga terkesan pemerintah memihak atau menyembunyikan kebenaran. Perilaku seperti ini dapat menciptakan perpecahan dan bahkan melemahkan upaya menjaga perdamaian. Peran pemerintah, khususnya Badan Kesbangpol, sangatlah penting. Perannya bukan hanya untuk mencegah penyebaran isu di masyarakat, tetapi juga untuk berbagi informasi secara terbuka, berkomunikasi secara jelas, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam penyelesaian masalah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjadi mediator terpercaya bagi semua orang dan harus berhati-hati dalam menghentikan penyebaran berita-berita negatif yang dapat merusak kerukunan yang telah dibangun. Dalam wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpol, Bapak Adri Timban, S.H., beliau mengatakan: *“Dalam setiap proses tentu tidak lepas dari berbagai hambatan, namun kami selalu berusaha untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut. Misalnya dalam penyelesaian suatu permasalahan, sering kali muncul pihak-pihak yang mencoba memprovokasi. Untuk meredam hal itu, kami membangun komunikasi yang positif dengan berbagai pihak. Walaupun niat dan tujuan kami adalah baik, tidak semua orang bisa langsung menerimanya. Namun melalui pendekatan komunikasi yang intens dan persuasif, secara perlahan mereka mulai terbuka dan bersedia bekerja sama. Intinya, kunci penyelesaiannya terletak pada bagaimana cara kita membangun komunikasi yang efektif.”*.(04/032025)

Ada banyak provokasi dari pihak luar terhadap Badan Kesbangpol dan masyarakat yang

berkonflik, tetapi dia percaya itu dapat diatasi.

2) Pendanaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong menghadapi banyak tantangan dan hambatan saat menjalankan tugasnya untuk menjaga kerukunan dan stabilitas di wilayah Kabupaten Sorong. Meskipun telah memiliki rencana, program, dan langkah-langkah yang dirancang untuk membantu mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat, implementasi kebijakan di bidang ini sering menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan secara efektif. *“Sebenarnya, tantangan yang kami hadapi termasuk dalam kategori hambatan klasik, yaitu terkait pendanaan. Jika anggaran yang tersedia lebih besar, tentu jangkauan program dan kegiatan kami pun akan lebih luas. Namun dengan keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah, kami tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas sebaik mungkin. Kendala utama yang kami hadapi sejauh ini memang berkaitan dengan aspek pembiayaan.”*

4. KESIMPULAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sorong memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas serta keharmonisan hubungan antarumat beragama di wilayahnya. Kiprah lembaga ini telah memberikan dampak positif terhadap keamanan dan kerukunan di tengah masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai program yang disusun dan dijalankan secara efektif, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi yang menekankan pentingnya hidup rukun antarumat beragama, dengan sasaran mulai dari lingkungan pendidikan hingga masyarakat umum. Program ini merupakan bagian dari upaya pembinaan yang secara konsisten dilakukan oleh Kesbangpol. Di samping itu, Kesbangpol juga membangun kerja sama yang erat dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui pertemuan rutin bulanan, dukungan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan, serta pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi lintas agama. Seluruh langkah ini merupakan strategi preventif untuk mencegah potensi konflik yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan

Dalam upaya menjaga stabilitas kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Sorong, terdapat berbagai faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat. Keberhasilan Kesbangpol dalam menciptakan hubungan yang harmonis di antara pemeluk agama tak lepas dari tingginya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sikap toleransi serta peran aktif tokoh agama di daerah tersebut. Tokoh agama memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan antarumat beragama. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah membangun komunikasi yang efektif antara Kesbangpol dan para pemuka agama. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya, tantangan tetap muncul, antara lain keberadaan oknum tertentu yang berusaha memprovokasi dalam penyelesaian masalah, serta keterbatasan dana dari pemerintah daerah yang menghambat perluasan pelaksanaan program secara menyeluruh..

Tokoh agama memiliki peran yang sangat signifikan dalam memelihara stabilitas kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Sorong. Terjalinnnya komunikasi yang efektif dengan para tokoh agama menjadi salah satu pendekatan strategis dalam upaya mempertahankan keharmonisan hubungan antar pemeluk agama di daerah Kabupaten Sorong.

REFERENSI

- [1] A. Nurdin, P. Rahmawati, and S. Rubba, “The Harmonious Communication Model among Religious Adherents in Sorong, West Papua,” *Journal Pekommas*, vol. 5, no. 2, pp. 157–166, 2020, doi: 10.30818/jpkm.2020.2050208.
- [2] M. A. Sila and Fakhruddin, *Indeks Kerukunan Umat Beragama 2019*. Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, Kementerian Agama RI, 2020.
- [3] J. L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

- 2013.
- [4] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
 - [5] A. Nurdin, P. Rahmawati, and S. Rubba, “The harmonious communication model on among religious adherents in Sorong, West Papua,” *Jurnal Pekommas: e-Journal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika*, vol. 5, no. 2, pp. 157–168, 2020.
 - [6] I. S. Nasution, *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pengawasan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara*, Doctoral dissertation, Universitas Medan Area, 2022.
 - [7] S. S. Pratama, “Tanggung jawab Badan Kesbangpol terhadap pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur,” in *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 1, pp. 193–200, Nov. 2020.
 - [8] M. A. Sila and Fakhrudin, *Indeks Kerukunan Umat Beragama*. Balitbang Kemenag RI, 2019/2020, p. 19.
 - [9] Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Mengendalikan Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia, 2002.
 - [10] E. Vinkasari et al., “Toleransi antar umat beragama di Indonesia untuk mempertahankan kerukunan,” in *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, vol. 1, 2020.